https://mapurna.id

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010**

**TENTANG**

**PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

a. bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persyaratan Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang–undangan.

Pasal 2

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3

(1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

(2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

(3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.

(2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.

(3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat–Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

**MENTERI KESEHATAN,**

**ttd**

**dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH**

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**Lampiran**
**Peraturan Menteri Kesehatan**
**Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010**
**Tanggal : 19 April 2010**

## PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

### I. PARAMETER WAJIB

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan | | |
| | | | |
| | a. Parameter Mikrobiologi | | |
| | 1) E.Coli | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
| | 2) Total Bakteri Koliform | Jumlah per 100 ml sampel | 0 |
| | b.Kimia an-organik | | |
| | 1) Arsen | mg/l | 0,01 |
| | 2) Fluorida | mg/l | 1,5 |
| | 3) Total Kromium | mg/l | 0,05 |
| | 4) Kadmium | mg/l | 0,003 |
| | 5) Nitrit, (Sebagai $N0_2^-$) | mg/l | 3 |
| | 6) Nitrat, (Sebagai $N0_3^-$) | mg/l | 50 |
| | 7) Sianida | mg/l | 0,07 |
| | 8) Selenium | mg/l | 0,01 |
| | | | |
| 2 | Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan | | |
| | | | |
| | a.Parameter Fisik | | |
| | 1) Bau | | Tidak berbau |
| | 2) Warna | TCU | 15 |
| | 3)Total zat padat terlarut (TDS) | mg/l | 500 |
| | 4) Kekeruhan | NTU | 5 |
| | 5) Rasa | | Tidak berasa |
| | 6) Suhu | □C | suhu udara ± 3 |
| | b.Parameter Kimiawi | | |
| | 1) Aluminium | mg/l | 0,2 |
| | 2) Besi | mg/l | 0,3 |
| | 3) Kesadahan | mg/l | 500 |
| | 4) Khlorida | mg/l | 250 |
| | 5) Mangan | mg/l | 0,4 |
| | 6) pH | | 6,5-8,5 |

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan |
|---|---|---|---|
| | 7) Seng | mg/l | 3 |
| | 8) Sulfat | mg/l | 250 |
| | 9) Tembaga | mg/l | 2 |
| | 10) Amonia | mg/l | 1,5 |

**II. PARAMETER TAMBAHAN**

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan |
|---|---|---|---|
| 1. | KIMIAWI | | |
| | | | |
| a. | Bahan Anorganik | | |
| | Air Raksa | mg/l | 0,001 |
| | Antimon | mg/l | 0,02 |
| | Barium | mg/l | 0,7 |
| | Boron | mg/l | 0,5 |
| | Molybdenum | mg/l | 0,07 |
| | Nikel | mg/l | 0,07 |
| | Sodium | mg/l | 200 |
| | Timbal | mg/l | 0,01 |
| | Uranium | mg/l | 0,015 |
| | | | |
| b. | Bahan Organik | | |
| | Zat Organik ($KMnO_4$) | mg/l | 10 |
| | Deterjen | mg/l | 0,05 |
| | Chlorinated alkanes | | |
| | Carbon tetrachloride | mg/l | 0,004 |
| | Dichloromethane | mg/l | 0,02 |
| | 1,2-Dichloroethane | mg/l | 0,05 |
| | Chlorinated ethenes | | |
| | 1,2-Dichloroethene | mg/l | 0,05 |
| | Trichloroethene | mg/l | 0,02 |
| | Tetrachloroethene | mg/l | 0,04 |
| | Aromatic hydrocarbons | | |
| | Benzene | mg/l | 0,01 |
| | Toluene | mg/l | 0,7 |
| | Xylenes | mg/l | 0,5 |
| | Ethylbenzene | mg/l | 0,3 |
| | Styrene | mg/l | 0,02 |
| | Chlorinated benzenes | | |
| | 1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) | mg/l | 1 |
| | 1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) | mg/l | 0,3 |
| | Lain-lain | | |
| | Di(2-ethylhexyl)phthalate | mg/l | 0,008 |
| | Acrylamide | mg/l | 0,0005 |
| | Epichlorohydrin | mg/l | 0,0004 |
| | Hexachlorobutadiene | mg/l | 0,0006 |

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan |
|---|---|---|---|
| | Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | mg/l | 0,6 |
| | Nitrilotriacetic acid (NTA) | mg/l | 0,2 |
| | | | |
| c. | Pestisida | | |
| | Alachlor | mg/l | 0,02 |
| | Aldicarb | mg/l | 0,01 |
| | Aldrin dan dieldrin | mg/l | 0,00003 |
| | Atrazine | mg/l | 0,002 |
| | Carbofuran | mg/l | 0,007 |
| | Chlordane | mg/l | 0,0002 |
| | Chlorotoluron | mg/l | 0,03 |
| | DDT | mg/l | 0,001 |
| | 1,2- Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | mg/l | 0,001 |
| | 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) | mg/l | 0,03 |
| | 1,2-Dichloropropane | mg/l | 0,04 |
| | Isoproturon | mg/l | 0,009 |
| | Lindane | mg/l | 0,002 |
| | MCPA | mg/l | 0,002 |
| | Methoxychlor | mg/l | 0,02 |
| | Metolachlor | mg/l | 0,01 |
| | Molinate | mg/l | 0,006 |
| | Pendimethalin | mg/l | 0,02 |
| | Pentachlorophenol (PCP) | mg/l | 0,009 |
| | Permethrin | mg/l | 0,3 |
| | Simazine | mg/l | 0,002 |
| | Trifluralin | mg/l | 0,02 |
| | Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA | | |
| | 2,4-DB | mg/l | 0,090 |
| | Dichlorprop | mg/l | 0,10 |
| | Fenoprop | mg/l | 0,009 |
| | Mecoprop | mg/l | 0,001 |
| | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid | mg/l | 0,009 |
| | | | |
| d. | Desinfektan dan Hasil Sampingannya | | |
| | Desinfektan | | |
| | Chlorine | mg/l | 5 |
| | Hasil sampingan | | |
| | Bromate | mg/l | 0,01 |
| | Chlorate | mg/l | 0,7 |
| | Chlorite | mg/l | 0,7 |
| | Chlorophenols | | |
| | 2,4,6 -Trichlorophenol (2,4,6-TCP) | mg/l | 0,2 |
| | Bromoform | mg/l | 0,1 |
| | Dibromochloromethane (DBCM) | mg/l | 0,1 |
| | Bromodichloromcthanc (BDCM) | mg/l | 0,06 |
| | Chloroform | mg/l | 0,3 |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Jenis Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan |
|---|---|---|---|
| | Chlorinated acetic acids | | |
| | Dichloroacetic acid | mg/l | 0,05 |
| | Trichloroacetic acid | mg/l | 0,02 |
| | Chloral hydrate | | |
| | Halogenated acetonitrilies | | |
| | Dichloroacetonitrile | mg/l | 0,02 |
| | Dibromoacetonitrile | mg/l | 0,07 |
| | Cyanogen chloride (sebagai CN) | mg/l | 0,07 |
| | | | |
| 2. | RADIOAKTIFITAS | | |
| | | | |
| | Gross alpha activity | Bq/l | 0,1 |
| | Gross beta activity | Bq/l | 1 |

**MENTERI KESEHATAN,**

**ttd**

**dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH**